



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **720677**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.842.320.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/225 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 282 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 112.800.000
3. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 114.000.000
4. Tanah Seluas 385 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 269.500.000
5. Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 341.600.000
6. Tanah Seluas 777 m2 di KAB / KOTA GOWA, WARISAN Rp. 85.470.000
7. Tanah Seluas 1230 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 135.300.000
8. Tanah Seluas 1215 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 133.650.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 417.800.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



3. MOTOR, KAWASAKI LX 150 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000
5. LAINNYA, POLYGON (SEPEDA) - Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000
6. LAINNYA, POLYGON (SEPEDA) - Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000
7. LAINNYA, POLYGON (SEPEDA) - Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 600.000
8. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.510.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	556.061.026
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.852.691.026
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.852.691.026

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.